

MANAJEMEN KOMUNIKASI BENCANA DI MASA PANDEMI COVID 19

Jamalus

Universitas Islam Syekh –Yusuf, Tangerang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses manajemen komunikasi bencana pada masa pandemi Covid-19. Hal ini perlu diangkat untuk menjadi pembelajaran bersama dan mengingatkan bahwa sampai saat ini pun, wabah ini masih menghantui masyarakat dunia, terutama di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan sumber data berupa buku-buku referensi dan artikel-artikel jurnal ilmiah. Hasil studi menunjukkan bahwa (1) pada aspek perencanaan komunikasi bencana, pelaksanaan manajemen komunikasi bencana pada masa pandemi Covid-19 tidak didahului dengan perencanaan komunikasi bencana yang matang yang terlihat dari banyak narasi dan tindakan pemimpin di Indonesia dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang pada awalnya, muncul pro dan kontra mengenai kecemasan dan tingkat bahaya virus Corona; (2) pada aspek pengorganisasian komunikasi bencana, walaupun dikatakan kurang cepat tanggap, pemerintah menetapkan pelbagai peraturan yang mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; (3) pada aspek pelaksanaan komunikasi bencana, dinilai bahwa peraturan yang dikeluarkan pemerintah tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi karena berpotensi *overlapping* antartugas pihak yang terkait; (4) pada aspek evaluasi komunikasi bencana, bisa dilakukan secara mingguan dan bulanan yang melibatkan seluruh pihak yang ada dalam tim untuk mengetahui *progress* kegiatan dan mengetahui kekurangan sebagai bahan dalam diperbaiki di masa depan.

PENDAHULUAN

Bencana merupakan salah satu bagian dalam kehidupan manusia yang datang tanpa diduga. Bencana selalu menimbulkan dampak buruk bagi manusia yang menjadi korban. Memahami bencana menjadi suatu hal yang sangat penting bagi setiap individu agar dapat tanggap dan mengetahui langkah yang harus

dilakukan saat bencana datang (Lestari dkk., 2013).

Menurut *International Strategy for Disaster Reduction–United Nations* (Paripurno, 2008), bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada

kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan, dan yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri.

Pada dasarnya, ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, nonalam, dan bencana sosial. Beberapa bencana alam yang sering melanda Indonesia antara lain gempa, tsunami, letusan gunung api, banjir, dan longsor. Bencana nonalam yang saat ini kita alami, yaitu wabah atau pandemi Covid-19.

Wabah Covid-19 atau virus Corona mulai muncul di akhir tahun 2019 yang tepatnya pada bulan Desember. Kejadian tersebut bermula di Tiongkok, Wuhan (Yuliana, 2020). Pada awalnya, virus ini diduga akibat paparan pasar grosir makanan laut Huanan yang banyak menjual banyak spesies hewan hidup. Penyakit ini dengan cepat menyebar di dalam negeri ke bagian lain China (Dong, Mo, dan Hu, 2020). Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome*

(ARDS) (Ren, dkk., 2020). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus (Susilo, Rumende, dan Pitoyo, 2020).

Munculnya 2019-nCoV telah menarik perhatian global. Pada 30 Januari, WHO telah menyatakan Covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (Dong, Mo, dan Hu, 2020). Penambahan jumlah kasus Covid-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antarnegara. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, dilaporkan total kasus konfirmasi 414.179 dengan 18.440 kematian (CFR 4,4%) dimana kasus dilaporkan di 192 negara/wilayah. Di antara kasus tersebut, sudah ada beberapa petugas kesehatan yang dilaporkan terinfeksi. Akhirnya, WHO mengumumkan Covid-19 pada 12 Maret 2020 sebagai *pandemic* (Putri, 2020).

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab Covid-19

ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia) Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan Covid-19 ini masih belum diketahui. Berdasarkan bukti ilmiah, Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet), Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19 termasuk yang merawat pasien Covid-19 (Putri, 2020). Tanda dan gejala umum infeksi covid-19 termasuk gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata adalah 5 - 6 hari dengan masa inkubasi demam, batuk, dan sesak napas. Pada kasus yang parah, covid-19 dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian (Tosepu, dkk., 2020).

Di Indonesia, dilaporkan bahwa kasus infeksi Covid-19 pertama kali pada 2 Maret 2020. Pasien yang terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia berawal dari suatu acara di Jakarta dimana penderita kontak

dengan seseorang warga negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah pertemuan tersebut, penderita mengeluh demam, batuk, dan sesak nafas (Putri, 2020).

Jumlah kasus di Indonesia terus meningkat dengan pesat hingga Juni 2020 sebanyak 31.186 kasus terkonfirmasi dan 1851 kasus meninggal. Kasus tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta, yakni sebanyak 7.623 kasus terkonfirmasi dan 523 (6,9%) kasus kematian (Putri, 2020).

Wabah ini telah ditetapkan sebagai darurat kesehatan global. Virus ini membuat semua kegiatan sehari-hari manusia terhambat, bahkan terhenti. Karantina saja mungkin tidak cukup untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 ini karena pandemi Covid-19 ini sangat berdampak bagi kehidupan manusia pada setiap aspeknya. Dampak yang ditimbulkan sangat meluas, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, Indonesia tidak bisa

hanya mengandalkan petugas kesehatan dan sarana prasarana saja, tetapi juga harus melibatkan masyarakat serta sistem kesehatan yang mendukung.

Dalam menangani sebuah bencana, apalagi bencana nasional, seperti pandemi Covid-19, masalah manajemen komunikasi bencana memegang peranan yang sangat strategis dalam menunjang efektivitas penanggulangan bencana, baik dari mulai mitigasi, penanganan sampai pascabencana. Jika tidak, akan terjadi miskomunikasi dan misinformasi sehingga terhambatnya penanganan sebuah bencana.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses manajemen komunikasi bencana pada masa pandemi Covid-19. Hal ini perlu diangkat untuk menjadi pembelajaran bersama dan mengingat bahwa sampai saat ini pun, wabah ini masih menghantui masyarakat dunia, terutama di Indonesia. Oleh karenanya, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan dengan “Bagaimana manajemen komunikasi bencana

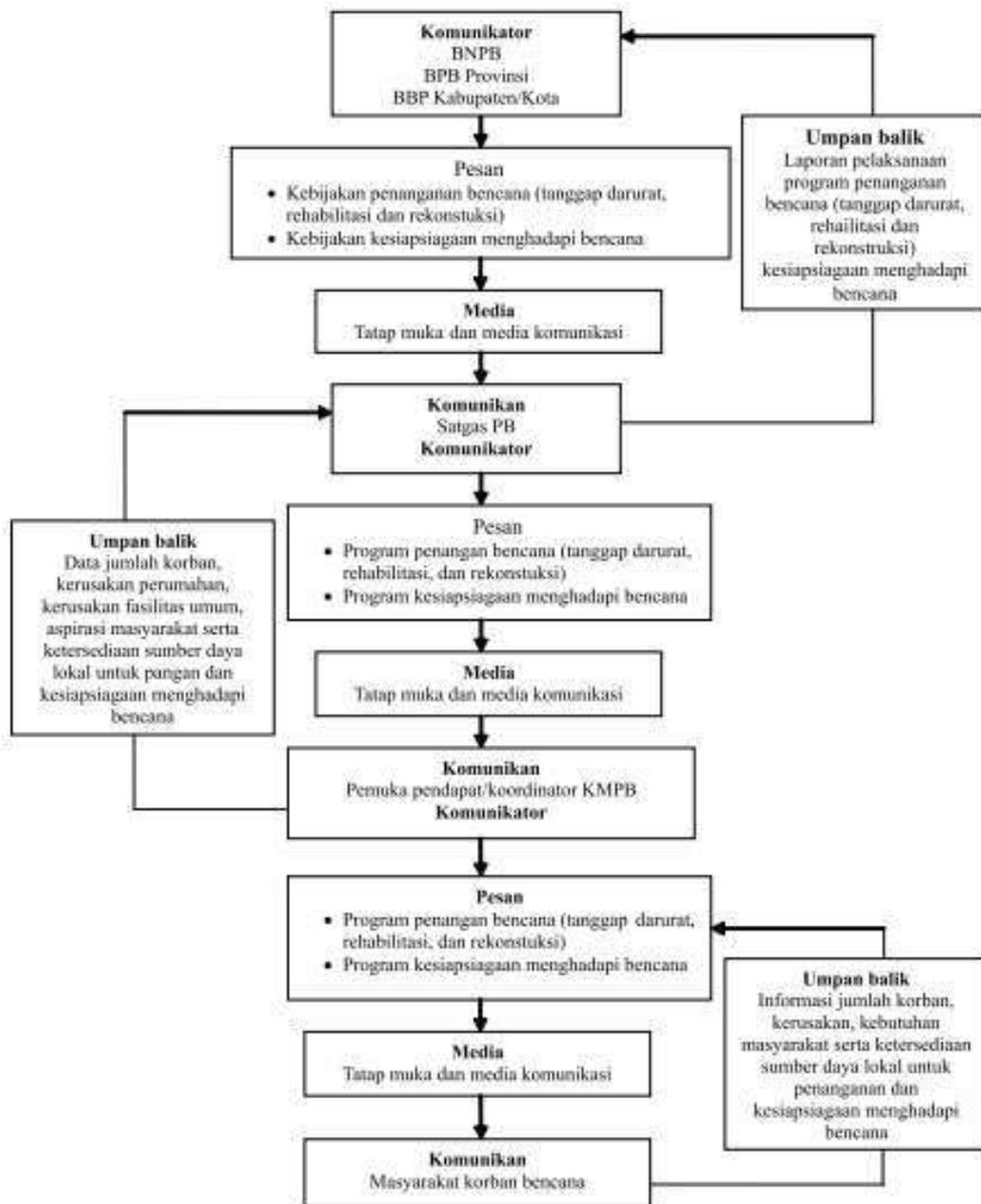
yang berlangsung pada masa pandemi Covid-19? Hal mengingat bencana pandemi Covid-19 merupakan kejadian pertama bagi Indonesia.

Manajemen bencana adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana pada, sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana yang dirancang untuk memberikan kerangka kerja bagi orang-perorangan atau komunitas yang berisiko terkena bencana untuk menghindari, mengendalikan risiko, mengurangi, menanggulangi maupun memulihkan diri dari dampak bencana (Paripurno, 2008).

Manajemen komunikasi bencana melibatkan perencanaan, pengorganisasian atau koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Keterlibatan dan koordinasi antarpihak pemerintah, lembaga berwenang, masyarakat, LSM, donatur, dan relawan dalam manajemen komunikasi bencana sangat dibutuhkan guna membangun suatu komunikasi bencana yang dapat dipahami makna pesannya sehingga menghasilkan umpan balik

yang diharapkan berdasarkan tujuan Gambar berikut ini pesan yang disampaikan (Lestari menunjukkan manajemen komunikasi bencana menurut dkk., 2013). Muhammad Badri (2008).

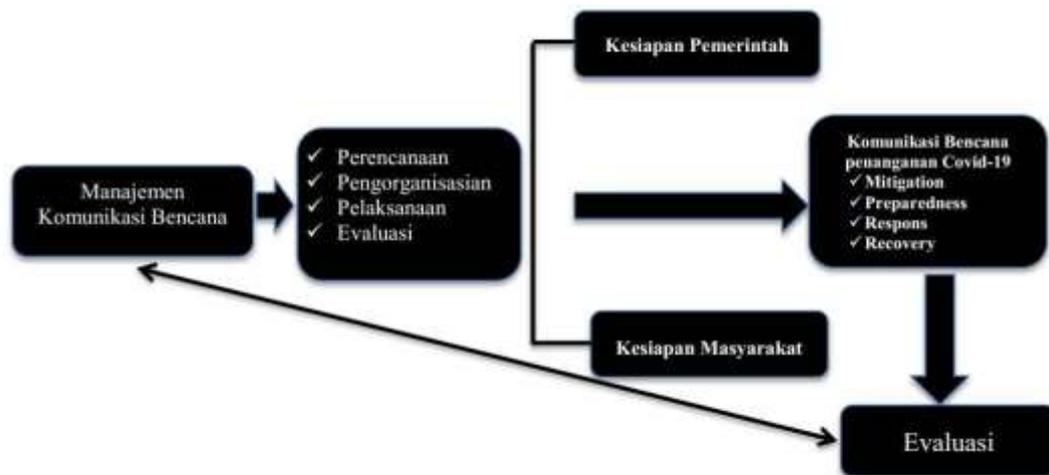
Gambar 1 Model Manajemen Komunikasi Bencana



Sebagaimana yang digambarkan oleh Muhammad Badri dalam gambar 1 di atas, manajemen komunikasi bencana tidak hanya sebatas menyampaikan sebuah pesan atau informasi, tetapi berlangsung pula umpan balik yang diharapkan dari pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikannya. Walaupun demikian, pada hakikatnya, tahapan suatu

manajemen komunikasi bencana bertujuan untuk mengelola bencana dengan baik dan aman. Manajemen komunikasi bencana dibangun dengan koordinasi berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan bencana. Pelaksanaan manajemen komunikasi bencana terdiri atas perencanaan, pengorganisasian atau koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi (Lestari dkk., 2013).

Gambar 2 Model Alternatif Manajemen Komunikasi Bencana



Dengan merujuk pada gambar 1 model alternatif manajemen komunikasi bencana di atas, penelitian ini akan menganalisis manajemen komunikasi bencana

pada masa pandemi Covid-19 yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat

studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan sumber data

berupa buku-buku referensi dan artikel-artikel jurnal ilmiah. Pada penelitian ini, rangkaian kegiatannya berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, lalu mengolah informasi yang sesuai dan diperlukan untuk menjawab rumusan masalah yang akan dipecahkan. Adapun prosedur yang dilakukan pada penelitian studi pustaka ini meliputi: (1) menggali ide umum tentang penelitian, (2) mencari informasi yang mendukung topik penelitian, (3) mempertegas fokus penelitian

PEMBAHASAN

Perencanaan Komunikasi Bencana pada Masa Pandemi Covid-19

Dalam konteks masa pandemi Covid-19, terdapat banyak narasi dan tindakan pemimpin di Indonesia dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19. Pada awalnya, muncul pro dan kontra mengenai kecemasan dan tingkat bahaya virus Corona. Menteri Kesehatan Terawan pada awalnya terkesan menganggap “enteng dan santuy” terhadap serangan Corona. Saat itu (Januari-Februari 2020) belum teridentifikasi

dan mengorganisasi bahan yang sesuai, (4) mencari dan menemukan sumber data berupa sumber pustaka utama, yaitu buku dan artikel-artikel jurnal ilmiah, (5) melakukan reorganisasi bahan dan catatan simpulan yang didapat dari sumber data, (6) melakukan *review* atas informasi yang telah dianalisis dan sesuai untuk membahas dan menjawab rumusan masalah penelitian, (7) memperkaya sumber data untuk memperkuat analisis data, dan (8) menyusun hasil penelitian.

penduduk Indonesia terpapar Covid-19. Narasi-narasi “orang Indonesia kuat,” “jamu membuat orang Indonesia kebal,” dan lain-lain, dikesani mengentengkan serangan Covid-19. Presiden Jokowi juga dianggap lambat mengambil tindakan membentengi Indonesia dari Covid-19 dengan tidak segera menutup wilayah dengan membiarkan transportasi tetap terbuka dengan dunia internasional. Bahkan, ia sempat mengajak tim selebgram untuk mempromosikan pariwisata Indonesia agar

mendatangkan wisatawan mancanegara ke Indonesia (Solahudin dkk., 2020).

Belakangan Menteri Kesehatan Terawan dan Presiden Jokowi mengklarifikasi ucapan dan tindakan mereka sebagai upaya agar rakyat Indonesia tidak stres menghadapi situasi Covid-19 yang mungkin masuk ke Indonesia. Bahkan, banyak pemimpin di Indonesia yang mengklaim bahwa pemerintah telah jauh-jauh hari menyiapkan diri menghadapi situasi ini. Salah satu bukti adalah dengan menjemput mahasiswa Indonesia yang sedang melaksanakan studi di China dan mengkarantinanya di pulau Galang selama empat belas hari (Solahudin dkk., 2020).

Kesan yang muncul di masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia terlalu lambat dalam bertindak melindungi rakyat Indonesia, apalagi jika dibandingkan dengan Vietnam dan Selandia Baru yang lebih sigap. Memang di sini ada tarik menarik kebijakan antara prioritas menjaga kesehatan atau menjaga kelangsungan ekonomi negara. Ketika Awal Maret 2020

teridentifikasi warga Depok yang terpapar Covid-19, mulailah pemimpin Indonesia lebih sigap menghadapi virus -sejalan dengan WHO yang menetapkan bahwa peristiwa ini merupakan pandemi. Sejumlah rumah sakit disiapkan, sejumlah dana dialokasikan, sistem bekerja dan belajar dirubah menjadi bekerja dan belajar dari rumah, beribadah di rumah dan hal-hal lain terkait. Dalam artikel-artikel yang muncul, tidak hanya Presiden dan pejabat daerah (pemimpin formal) juga pemimpin non-formal (ulama-MUI, ormas-ormas Islam dan lainnya) terlibat aktif berkontribusi dalam usaha pencegahan penyebaran/memutus siklus Covid-19 dan menghadapi situasi dampak sampingan pandemi, terutama kelangsungan hidup rakyat Indonesia (Solahudin dkk., 2020).

Dalam konteks perencanaan komunikasi bencana, pelaksanaan manajemen komunikasi bencana pada masa pandemi Covid-19 tidak didahului dengan perencanaan komunikasi bencana yang matang. Hal ini terlihat dari banyak narasi dan tindakan pemimpin di Indonesia

dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19. Bahkan, pada awalnya, muncul pro dan kontra mengenai kecemasan dan tingkat bahaya virus Corona sebagaimana telah dikatakan sebelumnya.

Pengorganisasian Komunikasi Bencana pada Masa Pandemi Covid-19

Pengorganisasian dalam manajemen komunikasi bencana erat kaitannya dengan pembentukan tim yang terdiri atas pihak-pihak yang memiliki tugas dan fungsi serta bertanggung jawab dalam pengelolaan bencana yang terjadi. Pengorganisasian melibatkan berbagai pihak dengan pemilihan yang tepat (Lestari dkk., 2013).

Penyebaran Covid-19 sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar. Untuk itu, pemerintah mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) karena ancaman Covid-19, yaitu ancaman di bidang kesehatan, menular di bidang sosial, ancaman di bidang ekonomi,

ancaman di sektor keuangan, dan di bidang lainnya (Haryanto, 2021).

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi (1) Penegasan PKTD, (2) Desa Tanggap COVID-19; dan (3) Penjelasan perubahan APBDes. Untuk pencegahan penyebaran Covid-19 yang disebut dalam edaran ini adalah, desa diinstruksikan untuk membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 yang terdiri atas semua elemen perangkat desa, tokoh masyarakat dan bermitra dengan Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa. Nantinya Relawan akan memiliki tugas dalam pencegahan penyebaran, penanganan terhadap warga korban Covid-19, dan melakukan koordinasi ke pemerintah daerah (SE. Menteri Desa PDTT No.8 Tahun 2020).

Pelaksanaan Komunikasi Bencana pada Masa Pandemi Covid-19

Seluruh pelaksanaan dalam manajemen komunikasi bencana dilakukan berdasarkan pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat dalam tim penanggulangan bencana. Pelaksanaan yang berpedoman pada peran fungsinya diharapkan dapat

mempercepat proses pencapaian tujuan dan menghindari risiko yang muncul (Lestari dkk., 2013).

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, menurut Ketua IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia) tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi Presiden Jokowi. Ketua IAKMI menilai, fungsi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 seharusnya melengkapi tugas-tugas kementerian terkait, bukan malah mengambil alih peranannya. Kementerian teknis yang harus diperkuat sehingga fungsi Satgas koordinasi dan penguatan peran, bukan mengambil alih peran Kementerian teknis (Haryanto, 2021).

Pemerintah Indonesia dalam merespon Covid-19 telah mengeluarkan kebijakan strategis mengatasi penyebaran Covid-19, yakni Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). PSBB yang dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili

dan/atau berkegiatan. Namun, fakta memperlihatkan kebijakan belum berjalan dengan efektif. Banyak unsur atau elemen yang tidak mematuhi kebijakan PSBB yang telah diterapkan oleh masing-masing pemerintah daerah di Indonesia, bahkan menimbulkan persoalan baru dalam dinamika pemerintahan yang dijalankan (Rahman, 2021).

Fakta yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PSBB yang diterapkan di beberapa daerah di Indonesia tidak berjalan sesuai harapan. Ketentuan-ketentuan dalam aturan PSBB secara umum belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Didapati masih ada ditemukan aktivitas bekerja (kantor, pasar, pabrik, rumah makan), masih ada kegiatan keagamaan di tempat ibadah, masih banyaknya aktivitas masyarakat diluar rumah, kegiatan ditempat umum yang belum menerapkan *physical distancing*, masih banyak masyarakat yang beraktivitas tidak menggunakan masker, dan masih banyaknya pergerakan orang yang menggunakan transportasi serta tidak mengikuti aturan PSBB (Rahman, 2021).

Dari keterangan di atas, komunikasi bencana dalam implementasi kebijakan PSBB yang diterapkan di beberapa daerah di Indonesia belum berjalan secara optimal. Hal ini tentunya sangat memengaruhi terhadap efektivitas penanggulangan Covid-19. Dalam pandangan Rahman (2021), ada beberapa faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pemerintah tersebut, yakni terdiri atas karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hubungan antarorganisasi dan lingkungan kebijakan.

Jaringan bersama dalam kondisi pandemi Covid 19 ini meliputi komunikasi bersama dengan tujuan mengurangi ketidakpastian informasi. Pihak-pihak yang ada dalam kondisi pandemi harus memperluas jaringan informasi untuk mengurangi ketidakpastian, seperti komunikasi yang dijalin oleh pemerintah, BNPB, Kementerian kesehatan, pemerintah daerah hingga tingkat RT dan RW.

Evaluasi Komunikasi Bencana pada Masa Pandemi Covid-19

Evaluasi yang dilakukan dalam hal ini adalah terhadap manajemen komunikasi bencana dalam tanggap darurat pada bencana Covid-19. Evaluasi yang dilakukan meliputi pelaksanaan suatu kebijakan atau kegiatan yang telah diprogramkan atau dilakukan dan dibahas dalam rapat bersama pihak tim penanggulangan bencana yang sudah dibentuk. Evaluasi yang dilakukan bisa sifatnya mingguan dan bulanan. Evaluasi dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak yang ada dalam tim untuk mengetahui *progress* atas kegiatan yang dilaksanakan dan mengetahui kekurangan sebagai bahan untuk dapat diperbaiki agar bisa lebih baik pada masa yang akan datang (Arif dan Lestari, 2021).

Komunikasi bencana yang terstruktur dengan baik bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan membutuhkan kesadaran dan kerja sama dengan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengurangan risiko bencana/wabah. *Transfer of*

knowledge dalam bentuk penguatan literasi melalui media massa dan *tools* dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya virus Covid-19 dan juga mendukung integrasi informasi pemerintah daerah dan juga desa berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari masyarakat (Nurussa'adah, 2021).

Masyarakat merupakan salah satu kelompok rentan (*element at risk*) yang dapat dilihat dari sisi usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan kondisi ekonomi, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan daya serap informasi dan pemahaman terhadap informasi untuk menurunkan tingkat kerentanannya. Menurunnya tingkat kerentanan masyarakat juga akan berpengaruh pada menurunnya risiko dari pandemi virus Covid-19 (Nurussa'adah, 2021).

Manajemen komunikasi bencana yang dilakukan pemerintah di atas merupakan sebagai salah satu strategi bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat dan memutus

mata rantai penyebaran Covid-19 yang sedang terjadi saat ini.

Manajemen komunikasi bencana melibatkan perencanaan, pengorganisasian atau koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Keterlibatan dan koordinasi antarpihak pemerintah, *stakeholders*, dan relawan dalam manajemen komunikasi bencana sangat dibutuhkan guna membangun suatu komunikasi bencana yang dapat dipahami makna pesannya sehingga menghasilkan umpan balik yang diharapkan berdasarkan tujuan pesan yang disampaikan.

KESIMPULAN

Memaksimalkan penanganan bencana tentu melibatkan *stakeholder* terkait. Masing-masing memiliki tugas, sumber daya, keterampilan, misi sampai kepentingan yang sama dan berbeda. Berbagai keluhan atau kritik atas fenomena penanganan terhadap suatu peristiwa bencana merupakan pelajaran yang penting dalam manajemen bencana. Hal ini tergambar dalam model alternatif manajemen komunikasi bencana

yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.

Pada aspek perencanaan komunikasi bencana, pelaksanaan manajemen komunikasi bencana pada masa pandemi Covid-19 tidak didahului dengan perencanaan komunikasi bencana yang matang yang terlihat dari banyak narasi dan tindakan pemimpin di Indonesia dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang pada awalnya, muncul pro dan kontra mengenai kecemasan dan tingkat bahaya virus Corona.

Pada aspek pengorganisasian komunikasi, walaupun dikatakan kurang cepat tanggap, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditandatangani pada 20 Juli 2020, yang kemudian diikuti oleh surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor SE.1/BNPB/03/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona*

Virus Disease 2019 (Covid-19) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Daerah, serta Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8/2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat karya Tunai Desa (SE. Menteri Desa PDTT No.8 Tahun 2020), merupakan lembaga yang menjadi komando utama penanggulangan bencana di tingkat desa.

Pada aspek pelaksanaan komunikasi bencana, dinilai bahwa Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi karena berpotensi *overlapping* antartugas pihak yang terkait. Selain itu, implementasi kebijakan PSBB yang diterapkan di beberapa daerah di Indonesia tidak berjalan sesuai harapan karena belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

Komunikasi sebagai bagian dari *transfer of knowledge* dalam komunikasi bencana dalam pelaksanaannya di masa pandemi Covid 19 umumnya meliputi komunikasi verbal, ekspresi afiliasi nonverbal, pencarian informasi, serta jaringan bersama.

Pada aspek evaluasi komunikasi bencana, dilakukan

secara mingguan dan bulanan. Evaluasi dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak yang ada dalam tim untuk mengetahui *progress* atas kegiatan yang dilaksanakan dan mengetahui kekurangan sebagai bahan untuk dapat diperbaiki agar bisa lebih baik pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fikri, Muchsin, Sandra Irawaty, Yuyun Yuniarsih, dan Purnama Rachmanita. 2021. "Komunikasi Bencana dan Managemen Kebencanaan dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kota Bandung." *Open Journal Systems: ejurnal binawakya* 15(12).
- Arif, Muhammad, dan Suci Shinta Lestari. 2021. "Manajemen Komunikasi Bencana Pemerintah Desa dalam Penanganan Covid-19." *Komunikasiana: Journal of Communiaction Studies* 3(1).
- Badri, Muhammad. 2008. "Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana Gempa Bumi di Yogyakarta (kasus Kabupaten Bantul)." Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Dong, Y, X Mo, dan Y Hu. 2020. "Epidemiology of Covid-19 Among Children in China." *American Academy of Pediatrics*. <https://doi.org/10.1542/peds.2020-0702>.
- Haryanto, H Edy. 2021. "Menakar Kebijakan Satu Atap Presiden Jokowi Terkait Keberadaan Perppu Covid-19." *Jurnal Mustika Justice – Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun - Jakarta* 1 (1): 17.
- Lestari, Puji, Agung Prabowo, Arif Wibawa, dan Retno Hendariningrum. 2013. "Manajemen Komunikasi Bencana Gunung Sinabung 2010 Saat Tanggap Darurat." *Jurnal ILMU KOMUNIKASI* 10: 20.
- Nurussa'adah, Erfina. 2021. "Komunikasi Bencana Menghadapi Era New Normal di Masa Pandemi Covid 19." *Altifani: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (2): 11.
- Paripurno, Eko Teguh. 2008. "Manajemen Resiko Bencana Berbasis Komunitas: Alternatif dari Bawah."

- Jurnal Dialog Kebijakan Publik* 1(2).
- Putri, Ririn Noviyanti. 2020. "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20 (2).
- Rahman, Khairul. 2021. "Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia." *Indonesian Governance Journal (Kajian Politik – Pemerintahan)* 4(1).
- Ren, L-L, Y-M Wang, Z-Q Wu, Z-C Xiang, L Guo, dan T Xu. 2020. "Identification of a Novel Coronavirus Causing Severe Pneumonia in Human: a Descriptive Study." *Chin Med J.* <https://doi.org/10.1097/CM9.0000000000000722>.
- Sahputra, Dedi. 2020. "Manajemen Komunikasi Suatu Pendekatan Komunikasi, Communication Management A Communication Approach." *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study* 6(2).
- Solahudin, Dindin, Dang Eif Saiful Amin, Deden Sumpena, dan Fathin Anjani Hilman. 2020. "Analisis Kepemimpinan di Indonesia dalam Kerangka Tanggap-Darurat Covid-19." *Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Masa Work From Home Tahun 2020*, 11.
- Susilo, A, C. M. Rumende, dan C. W. Pitoyo. 2020. "Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures." *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7(1): 45–64.
- Tosepu, R, J Gunawan, D. S. Effendy, L. O. A. I. Ahmad, H Lestari, H. Bahar, dan P. Asfian. 2020. "Correlation Between Weather and Covid-19 Pandemic in Jakarta, Indonesia." *Sci. Total Environ.* <https://doi.org/doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138436>.
- Yuliana. 2020. "Corona Virus Disease (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur." *Wellness and Healthy Magazine* 2(1): 187–92.